

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alam, Tunggal Wawan, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Jakarta.
- Alatas, Syed Hussein, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafik, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, amarta buku, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady Riyadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daniel, Elwi, *Korupsi: konsep, tindak pidana dan pemberantasnya*, Raja grafindo, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian yuridis normatif Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fngsinya Dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ervianto, *Manajemen Konstruksi Proyek*, Andi Pustaka, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 1986, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta.
- , 2007, *pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasioanl dan Internasional*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Karto H.K, Soetardjo, 2000, *Desa*, Sumur, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006, *Memahami untuk membasmi: Buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Mankiw N,Gregory, dkk. 2003. *Teori Makroekonomi*, Erlanga, Jakarta
- Mubyarto, 1995, *Ekonomi dan Keadilan sosial*, LP3ES, Yogyakarta
- Muladi dan Brada Nawawi Arief, 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktek: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 2008, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rachman, T.A, 2009, *Doktrin Kejaksaan*, buku pedoman pendidikan pembentukan Jaksa.

Rais, Amin, 1999, Pengantar dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), *Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta.

Semma Mansur, 2012, *Negara dan Korupsi*, Obor Indonesia, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soekantor, Soerjono, 2007, *Penelitian hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

2. Tugas Akhir

Rosana, Tia, 2015, *Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Artikel Internet

Effendi, Marwan, "Sejarah Kejaksaan RI", Shvoong.com. <http://id.shvoong> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

Estu Suryowati, "Kejaksaan Agung Akui TP4 bersifat pasif berdasarkan Permintaan" <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/20241491/kejaksaan-agung-akui-tp4-bersifat-pasif-berdasarkan-permintaan>.
di akses 18/5/2018

Kejaksaan Republik Indonesia Sejarah Kejaksaan, *Kejaksaan Republik Indonesia*, www.Kejaksaan.go.id di akses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Kejaksaan Tinggi DIY, 2015, "Pembentukan TP4D/P", <http://www.kejati->

diy.go.id/220-judul-tp4d.html diakses pada tanggal 28 Oktober 2017

----- “Pembentukan TP4D”, <http://www.kejati-diy.go.id/220-judul-tp4d.html> diakses pada tanggal 02 November 2017.

Sabda, Wahyu, “TP4D cocok kawal optimalisasi dana desa”,
<http://politik.rmol.co/read/2017/08/23/304161/TP4D-Cocok-Kawal-Optimalisasi-Dana-Desa> diakses pada 02 November 2017.

Wahyudi, “Corruption Preception Indeks 2014”, <http://www.ti.or.id> diakses pada tanggal 15 Oktober 2017.

4. Peraturan Perundangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undnag-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi Publik

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyedia Infrastruktur Priotitas

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembagunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.



Analisis Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur
MUHAMMAD DAVID R, Prof.Dr.,Edward Omar Sharif Hiariej.,S.H.M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-04/A/JA/11/2016
tanggal 22 November 2016 tentang Mekanisme kerja teknis dan
adminstrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia